



**RAPAT KOORDINASI**  
**PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**  
**BERSAMA**  
**MENTERI DALAM NEGERI**  
**Selasa, 22 Juli 2025**

**TPID KOTA BANJARBARU**  
**TAHUN 2025**

# UNDANGAN RADIOGRAM



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA

Register No : .....

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI : MENTERI DALAM NEGERI			
UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA			
TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI			

KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA  
Nomor : 500.2.3/3942/SJ

DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN PEMBAHASAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA

AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR *ONLINE* PD HARI SELASA TGL 22 JULI 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI *ZOOM MEETING* DGN *MEETING ID 677 057 3756* PASSWORD INFLASI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI\_JABATAN\_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL *YOUTUBE* KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA

BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK KMA

CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA

SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA *ONLINE* BERSAMA KAPOLDA KMA PANGDAM GARING DANREM KMA KAJATI KMA SEKDA PROV KMA INSPEKTUR DAERAH PROV KMA INSPEKTUR KODAM KMA KA BAPPEDA KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA

DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA *ONLINE* BERSAMA KAPOLRESTABES KMA DANDIM KMA KAJARI KMA SEKDA KAB GARING KOTA KMA INSPEKTUR DAERAH KAB GARING KOTA KMA KA BAPPEDA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA

TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA

EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DI INFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA

LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI *DRESS CODE* PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA

DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA

EEE TTK DUM TTK HBS

TANGGAL PEMBUATAN 20 Juli 2025

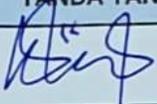
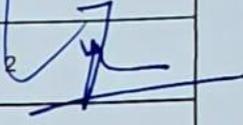
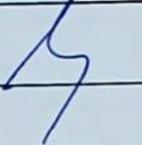
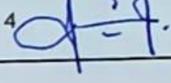
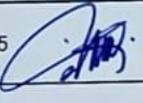
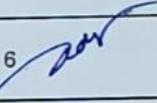
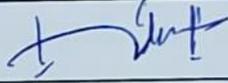
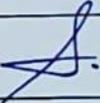
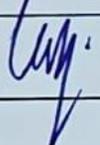
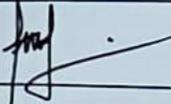
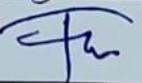
Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL	No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal Tomsir Tohir		Terima	Kirim		
Tanda Tangan					

# DAFTAR HADIR

## DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi Via Zoom

Hari/Tanggal : Selasa / 22 Juli 2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	SRI LAHAMA	Asisten &	P	1 
2	FADHURRASHMAN	Boy Eko & sda	L	2 
3	Ahmad dydia	DISPERKIM	L	3 
4	Siti Fauziah	Bapperida	P	4 
5	Junaedi: A	Inspektoral	L	5 
6	Arief R.H	BPKAD	L	6 
7	Endah M	DKP3	P	7 
8	KRISTIAN	Diskominfo		8 
9				9
10	DIAN YUDHA A	BAG. ECO SPA		10 
11				11
12	Stephana	umum		12 
13	deno			13 
14	lito			14 
15	Indra	Perekonomian		15 
16	Mina	Perekonomian		16 
17	RISA A	umum		17 
18	FATIMAH	- - -		18 
19	Aula Rahman W.	umum		19 

# NOTULEN RAPAT



## PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

### NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/3942/SJ Tanggal 20 Juli 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta :
  1. Menteri Dalam Negeri
  2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat : Selasa, 22 Juli 2025 pukul 09.00 WITA  
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Trisakti Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- V. Hasil :
  1. **BADAN PANGAN NASIONAL**
    - a) Realisasi penyaluran beras SPHP 20 Juli 2025 sebesar 12,15% atau 182,2 ribu ton dari total pagu tahun 2025 1,5 juta ton.
    - b) Peran pemerintah daerah dalam SPHP beras
      - Koordinasi Intensif: koordinasi dengan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang perum bulog di penyaluran sphp beras dan bantuan pangan beras.
      - Optimalisasi penyaluran: masifkan penyaluran pedagang kios pasar tradisional, GPM dan koperasi KDMP dan outlet/kios pangan binaan pemda.
      - Dokumentasi & Pemantauan: dokumentasikan dan penyebaran informasi/berita kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan bersama satgas pangan Polri.
    - c) Aksi strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025
      - Realisasi serap gabah/beras sebanyak 2,73 juta ton setara beras
      - Penguatan cadangan beras pemerintah (CPP per 17 Juli 2025 sebanyak 4,24 juta ton)
      - Penyaluran beras SPHP (realisasi tahun 2025 sebanyak 182 ribu ton)
      - Penyaluran bantuan pangan tahun 2025 (10 kg beras per bulan kepada 18,3 juta KPM selama 2 bulan Juni-Juli)
      - Gerakan pangan murah (GPM) tahun 2025 terlaksana sebanyak 4.426 kali di 267 kab/kota dan 35 provinsi.
      - Panel harga pangan selalu up to date (terdapat 1.015 enumerator yang setiap hari akan melaporkan harga terupdate di lapangan).
      - Kios pangan sebanyak 1.088 unit yang tersebar di 33 provinsi dan 110 kab/kota.
      - Pemanfaatan sarana dan prasarana rantai dingin (2022-2024) (terdapat 42 sarpras)
      - Pemanfaatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan (sudah terdapat 17 mobil laboratorium keliling untuk pengawasan keamanan pangan pada tahun 2024)
      - Gerakan stop boros pangan serta penyelamatan pangan (gerakan ini untuk mengurangi food loss dan food waste)
      - B2SA go to school/pesantren, rumah pangan B2SA di desa, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal di 34 lokasi
      - Sinergi perumusan standar dan pengawasan keamanan pangan segar

# NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- Intervensi pengendalian kerawanan pangan di 8 provinsi 20 kota 45.000 kepala keluarga dan aksi kesiapsiagaan pangan di 4 provinsi

## 2. BADAN PUSAT STATISTIK

- a) Inflasi bulan ke bulan 0,19% (Juni 2025 terhadap Mei 2025), inflasi tahun ke tahun 1,87% (Juni 2025 terhadap Juni 2024) dan inflasi tahun kalender 1,38% (Juni 2025 terhadap Desember 2024).
- b) Pada M3 Juli 2025, tercatat 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 1 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 35 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit, bawang merah, dan beras.
- c) Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M3 Juli 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH.
- d) Kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kab. Kupang dengan nilai perubahan IPH 5,86%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, beras dan bawang merah.
- e) Secara nasional, rata-rata harga minyakita pada M3 Juli 2025 berada di atas HET, secara umum harga minyakita s.d. M3 Juli 2025 turun 0,23% dibanding Juni 2025.

## 3. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a) Peran strategis kejaksanaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi
  - Inflasi daerah yang tidak terkendali berdampak pada daya beli masyarakat.
  - Pertumbuhan ekonomi memerlukan stabilitas harga dan distribusi komoditas yang lancar.
  - Kejaksanaan berperan dalam mendukung program pengendalian inflasi melalui pendekatan hukum
- b) Saran dan masukan kejaksanaan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi terkait evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program pembangunan 3 juta rumah:
  - Pendampingan hukum terhadap percepatan pembangunan rumah
  - Dukungan terhadap program subsidi dan fasilitas pembiayaan
  - Penertiban tata ruang dan perizinan
  - Pencegahan potensi fraud dalam pengadaan lahan
  - Penertiban rumah kosong dan penimbunan stok
  - Sinergi dengan sektor perbankan dan developer
- c) Kejaksanaan mendukung pengendalian inflasi melalui pendekatan preventif dan olutif dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, mencegah potensi pelanggaran hukum dalam distribusi dan perdagangan bahan pokok di daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
- d) Kejaksanaan berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung akselerasi program perumahan rakyat yang sehat, akuntabel dan aman dari resiko hukum.
- e) Kejaksanaan mendorong percepatan realisasi belanja subsidi pangan, bantuan sosial dan infrastruktur logistik dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat prosedur serta siap mendukung Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat dan menjamin keadilan distribusi komoditas strategis melalui pendekatan

# NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

hukum yang humanis dan solutif

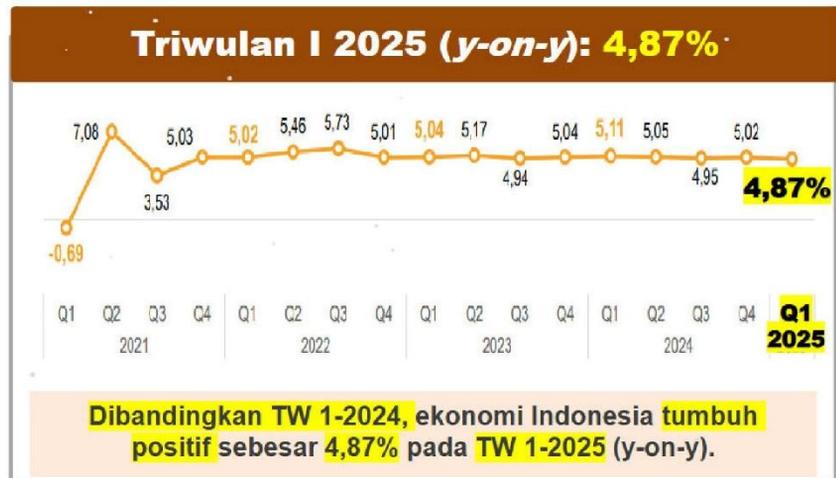
- f) Kejaksaaan siap memberikan Pendampingan Hukum terhadap Pemerintah Daerah dalam percepatan Pembangunan Rumah khususnya terkait perizinan, pengadaan lahan dan pengamanan investasi agar bebas dari potensi sengketa atau penyimpangan hukum

## 4. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- a) Per 16 juli 2025 dibandingkan bulan lalu harga barang kebutuhan pokok cenderung stabil, diantaranya minyak goreng kemasan, daging sapi, telur ayam ras dan terigu.
- b) Komoditas yang cenderung turun dibandingkan bulan lalu yaitu Minyakakita, bawang putih dan gula pasir.
- c) Komoditas yang mencatatkan peningkatan harga yaitu beras medium (terutama di region A/sentra produksi dan region C/sentra konsumsi 2) dan daging ayam ras (normalisasi menuju harga acuan) serta bawang merah (pengaruh musim).

## 5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a) Pertumbuhan ekonomi Indonesia



- b) Inflasi Indonesia berada pada peringkat ke-61 dari 186 negara di dunia dan peringkat ke-8 dari 11 negara di ASEAN.
- c) Arahan dan penekanan dalam pengendalian inflasi yaitu:
- Secara konsisten melaksanakan Rapat Koordinasi atau Anev Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI.
  - Memastikan ketersediaan stok/pasokan secara rutin serta melakukan analisis prediksi kenaikan/penurunan harga bahan pangan pokok. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, serta melakukan pengecekan lapangan/pasar
  - Perlu lebih merinci jenis komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga per hari dan mingguan. Perlu menetapkan target penurunan harga komoditas yang diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Melakukan Rekonsiliasi data, mengintegrasikan data-data baik yang ada di Kementerian Pertanian, Badan Pangan, Bulog, Kementerian Perdagangan maupun di Daerah agar data yang direkonsiliasi betul-betul bisa kita mengintervensi secara tepat.

# NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- Pemda agar mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT)
  - Melakukan langkah yang lebih proaktif, konkrit dan cepat dalam pengendalian inflasi daerah, berbasis data dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia setempat serta memperhatikan hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan
- d) Arahan dan penekanan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:
- Pemda diminta melakukan pemantauan berkala atas kinerja pertumbuhan ekonomi dengan berkoordinasi bersama BPS dan K/L terkait, serta menyusun strategi mitigasi terhadap risiko perlambatan ekonomi. Langkah korektif harus dilakukan cepat jika terjadi tekanan terhadap indikator ekonomi makro daerah.
  - Pemda harus mendorong kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem OSS (Online Single Submission), menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif, serta melakukan promosi potensi ekonomi daerah kepada investor nasional maupun internasional.
  - Pemerintah Daerah diminta untuk memperkuat sektor produktif melalui hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri kreatif lokal, serta memberikan dukungan penuh kepada UMKM melalui pembinaan, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan pelatihan kewirausahaan.
  - Pemerintah Daerah diminta untuk menyelaraskan program-program peningkatan ekonomi ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD, yang fokus pada sektor unggulan daerah, transformasi ekonomi, pengurangan pengangguran, dan peningkatan investasi lokal.
  - Pemda harus fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas antarwilayah, seperti jalan produksi, pelabuhan, pasar rakyat, dan kawasan industri, guna memperlancar distribusi barang dan jasa serta menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah

## 6. KEMENTERIAN PERTANIAN

- a) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dg berdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar
- b) Guna mencukupi kebutuhan secara mandiri cabai rawit per tahun, prov Lampung menambah tanam 5.260 ha, Banten 4.813 ha, Sumsel 2.734 ha, Riau 2.137 ha, Jabar 1.421 ha, Kaltim 987 ha, Sulut 750 ha, Kepri, 674 ha, Papua Pegunungan 542 ha, Kalbar 482 ha, dan lainnya
- c) Pemenuhan cabai merah secara mandiri, per tahun Banten menambah tanam 5.798 ha, Riau 5.303 ha, DKI Jakarta 4.607 ha, Sumsel 3.817 ha, Sumut 2.014 ha, Lampung 1.353 ha, Kepri 1.007 ha, dan lainnya.
- d) Bagi provinsi defisit bawang merah, agar menambah tanam per tahun Banten 3.543 ha, DKI Jakarta 3.200 ha, Lampung 3.179 ha, Riau 2.716 ha, Sumsel 2.660 ha, Kaltim 1.330 ha, Kalsel 1.277 ha, Kalbar 1.175 ha, dan lainnya.
- e) Bagi provinsi defisit telur ayam ras dan daging ayam ras, agar dapat dilakukan dengan memindahkan atau menyalurkan provinsi surplus ke provinsi defisit yang diikuti tanam jagung, tanam jagung dan memproduksi telur dan ayam secara bertahap mandiri

# NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- f) Progres tambahan luas tanam cabai dan bamer serta ayam agar dilaporkan secara periodik bulanan.
- g) Bagi provinsi surplus pangan sdh mulai bertahap hilirisasi produk dan ekspor
- h) BMKG pantau curah hujan dan kini sebagian wilayah memasuki musim kemarau pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera
- i) Sukseskan program Optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, sinergi irigasi PUPR, mekanisasi, benih unggul, KUR, subsidi pupuk, brigade pangan, sinergi irigasi PUPR, program tanam padi dan jagung Bersama TNI, Polri, Kemdagri, Kemendes, Kementransm K/L terkait

## 7. KANTOR STAF PRESIDEN

- a) Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 18 Juli 2025)

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman	Kedelai	Daging Sapi	Cabai Merah Keriting
	Waspada	Minyakita, Gula Pasir Curah	Bawang Putih	Jagung Tk Peternak, Telur Ayam Ras
	Tidak Aman	-	Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 2), Beras Medium (Zona 3)	Cabai Rawit Merah, Bawang Merah, Daging Ayam Ras

- b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 18 Juli 2025)

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Jayawjaya	8	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Merauke	8	Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras, Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kota Ternate	6	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Nabire	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Minyakita, Daging Sapi
Kab. Manokwari	4	Bawang Putih, Beras Medium, Daging Ayam Ras, Jagung Tk Peternak
Kab. Kayong Utara	4	Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Sorong Selatan	3	Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Minyakita
Kota Jayapura	3	Bawang Merah, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Sorong	3	Bawang Putih, Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kota Kupang	3	Bawang Putih, Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Berau	3	Cabai Merah Keriting, Gula Pasir Curah, Daging Sapi
Kab. Sumba Timur	3	Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Timor Tengah Selatan	3	Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Belitang Timur	2	Bawang Merah, Daging Ayam Ras
Kota Tual	2	Bawang Merah, Cabai Rawit Merah
Kab. Sukamara	2	Bawang Putih, Telur Ayam Ras
Kota Cilegon	2	Bawang Putih, Jagung Tk Peternak
Kab. Mimika	2	Beras Medium, Telur Ayam Ras
Kab. Minahasa Selatan	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kab. Morowali	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kota Manado	2	Beras Medium, Telur Ayam Ras
Kab. Bulungan	2	Cabai Merah Keriting, Daging Sapi
Kota Gunungsitoli	2	Gula Pasir Curah, Kedelai
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak

- c) Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kab dan Kota

- Per Juni 2025, total stok CPPD kab dan kota sebanyak 13.409,42 ton
- Dari 38 Provinsi di Indonesia, tercatat 32 Provinsi telah menyelenggarakan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Sementara itu, 6 Provinsi lainnya belum menjalankan kegiatan tersebut, yaitu Provinsi Maluku, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan DKI Jakarta
- Dari 514 Kabupaten/Kota, tercatat 322 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki stok CPPD, sedangkan 192 Kabupaten/Kota belum memiliki CPPD

# NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

## 8. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Secara administrasi, 99% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri.

Rekomendasi pendataan perumahan di tingkat daerah

- a) Diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)
- b) Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Crosscheck terhadap target Unit Renovasi Rumah/Pembangunan Baru sesuai dengan informasi yang kami sampaikan.
- c) Perlu perhatian khusus Pemerintah Daerah untuk menggerakkan Pemerintah Desa dan Dinas terkait dalam melakukan pendataan perumahan.

Arahan strategis kepada Pemerintah Daerah yaitu:

- a) Mensosialisasikan secara masif program PBG dan BPHTB Secara Gratis pada seluruh masyarakat menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh PEMDA (Videotron, Baliho, Medsos Pemda, dll)
- b) Melakukan pendampingan kepada Desa dalam Musrembang Desa agar menganggarkan kegiatan Perumahan dalam APBDesa.
- c) Menganggarkan Pembangunan Rumah Baru/RTLH dalam APBD.
- d) Mengkoordinasikan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pendataan perumahan Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan turut serta berkoordinasi Kepada PemKab, PemDes, maupun Dinas/OPD terkait dengan Pendataan Perumahan.
- e) Meningkatkan pengawasan kepada Developer/Pengembang Perumahan agar perumahan yang dibangun sesuai dengan spesifikasi dalam PBG dan SitePlan yang telah di sah-kan agar Masyarakat Mendapatkan Hak-Haknya.
- f) Melakukan pendataan lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai Perumahan terutama lahan negara yang tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan(Lahan Kas Desa, Lahan Pemerintah Daerah, Lahan Negara, Lahan Kementerian/Lembaga, Lahan Hibah Masyarakat) yang dapat digunakan untuk perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

## 9. SATGAS PANGAN POLRI

- a) Temuan Mentan sebanyak 212 merk beras premium dan medium duperiksa di 13 lab di 10 provinsi dengan hasil tidak sesuai mutu (85,56%), dijual di atas HET (59,78%) dan beratnya tidak sesuai (21%).
- b) Hasil tindak lanjut Satgasda terkait pengawasan beras yaitu:
  - Melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap pelaku usaha di penggilingan, pasar tradisional dan retail modern yang menjual beras premium dan medium di atas harga HET yang ditetapkan dan berat riil tidak sesuai kemasan/label.
  - Melakukan pengecekan kesesuaian mutu beras yang dijual dengan yang dicantumkan pada kemasan/label.
  - Terus melakukan penyelidikan dengan pengambilan sampel, cek lab, lakukan klarifikasi (15 produsen) dan keterangan ahli.
- c) Rekomendasi Satgas pangan Polri kepada Pemda yaitu memperkuat pengawasan distribusi komoditas strategis (beras bantuan pangan, beras SPHP/stabilisasi pasokan dan harga pangan) dengan melibatkan K/L

# NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

terkait serta satuan kewilayahan untuk menjamin keterjangkauan harga dan ketepatan sasaran distribusi.

## 10. TENTARA NASIONAL INDONESIA

- a) Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab petani periode Feb s/d Juli 2025.
- b) Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, diantaranya TMMD, Bhaksos, pendampingan petani & Kementan, bazar murah/UMKM, serbuan ter serta Kampung Bahari Nusantara.
- c) TNI juga bantu bentuk SPPG & operasional MBG
- d) TNI merekomendasikan agar semua Pemda Prov/Kab/Kota untuk bersinergi dengan TNI, Polri dan Komp lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

### REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) Indeks Perkembangan Harga (IPH) kondisi Minggu ke-3 Juli 2025 di Kota Banjarbaru terjadi Perubahan Harga sebesar -0,39 (Deflasi). Komoditas yang menjadi andil perubahan harga terbesar adalah Daging Ayam Ras (-0,3846), bawang putih (-0,2799) dan Cabai Merah (-0,0776). Kedepannya TPID Kota Banjarbaru harus terus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi deflasi terus menerus serta tetap menjaga tingkat inflasi agar tidak melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- 2) Agar TPID Kota Banjarbaru melaksanakan 6 upaya konkret secara penuh karena saat ini Kota Banjarbaru hanya melaksanakan beberapa upaya konkret saja.
- 3) Terus melakukan pemantauan harga dan menjaga stok barang agar tetap stabil
- 4) Melakukan rapat koordinasi TPID secara rutin dan berkala
- 5) memastikan komunikasi yang baik antara semua pemangku: pemerintah, BI, BPS, distributor, pedagang, dan petani
- 6) mengadakan pasar murah atau operasi pasar pada saat terjadi lonjakan IPH
- 7) Menggunakan media lokal untuk info harga acuan terbaru, jadwal pasar murah, dan prakiraan IPH
- 8) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, diharapkan Kota Banjarbaru mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan memberdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik serta memperlancar distribusi pasar

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



**DIAN YUDHA ASTUTI, SE**

NIP. 197803042009012001

## FILE FOTO (22 Juli 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Trisakti Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru